

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, I. K. A. P., Kalangi, L., & Wangkar, A. (2024). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Sesuai Undang- Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 Pada Sintesa Peninsula Hotel Manado. *Jurnal EMBA*, 12(1), 791–801.
- Amalia, E. V., Hernawati, R. I., Durya, N. P. M. A., & Isthika, W. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 11(3), 39–51. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i3.2211>
- Anissa, D. N., Ningsih, S., & Hasan, M. (2024). Analisis Dampak Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Karyawan Berdasarkan PP No 58 Tahun 2023 Dengan UU HPP No 7 Tahun 2021. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)*, 1(4), 347–355.
- ASRIN, A. (2022). Metode Penelitian Eksperimen. *Maqasiduna: Journal of Education, Humanities, and Social Sciences*, 2(01), 21–29. <https://doi.org/10.59174/mqs.v2i01.24>
- Harahap, N. (2020). *No Title*.
- Huberman Miles. (2014). *No Title*. Scribd. <https://id.scribd.com/document/243224276/Miles-Huberman-Buku>
- Indonesia, P. R. (2007). Indonesia, P. R. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. Jakarta. Presiden Republik Indonesia. *Indonesia, 1994*, 70.
- Kemenkeu, 2016. (2016). “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.” *Jdih.Kemenkeu.Go.Id, April*, 1–4.
- Kurnianingsih, R. (2022). Analisis Pajak Penghasilan sebelum dan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bagi WP Orang Pribadi. *Journal Competency of Business*, 5(02), 112–129. <https://doi.org/10.47200/jcob.v5i02.1097>
- Kurniyawati, I. (2019). Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT. X Di Surabaya. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI)*, 4(2), 1057–1068.
- Munandar, A., Coyanda, J. R., & Romli, H. (2024). *ANALISIS PP NOMOR 58 TAHUN 2023 TERHADAP PEMOTONGAN PPH PASAL 21 KARYAWAN (STUDI KASUS PADA PT. XYZ)*. 10, 43–62.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2016). *PMK Nomor 102/PMK.010/2016 Tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan*

Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN Menimbang PAJAK PENGHASILAN. 3.

President Republik Indonesia. (2023). *n, Jasa, atau Kegiatan wajib Pajak orang Pribadi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak PEnghasilan Pasa 21 atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerja. 1900224.*

Putri, Y. A., Harmelia, Seplinda, M., & Ulhusna, M. (2024). Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023. *Jurnal Pendidikan Tambusa, volume 8 n(58), 23925–23933.*

Republik Indonesia, P. (2017). Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: Per- 31 /Pj/2009. *Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.*

Rijali, A. (2018). *Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin. 17(33), 81–95.*

Sustiyo Wandu □□ Tri Nurharsono, A. R. (2013). Pembinaan Prestasi Ekstrakurikuler Olahraga Di Sma Karangturi Kota Semarang. *Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreations, 2(8), 524–535.*

Syarifudin, A. (2018). *No Title (Mispiananti (ed.)). STIE Putra Bangsa.*

Undang-Undang Nomor 7. (2021). Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). *Republik Indonesia, 12(November), 1–68.*

UU No. 36 Tahun 2008. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.*

Skripsi

Fachrizar, Gilang (2023). Penerapan perhitungan PPH 21 berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 pada pegawai tetap PT X. Volume 24 Nomor 1 Tahun 2023 hal 33-41. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Harahap, Subur (2023). *Kajian kompratif manajemen pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan PER 16/PJ/2016 dan PP 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan sehubungan dengan pekerjaaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Volume 26 Nomor 3 2023. Institut Bisnis Nusantara.*

Ketut, I Arya Putra. dkk (2024). *Analisis pajak penghasilan pasal 21 sesuai undang undang harmonisasi peraturan perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 pada Sintesa*

Peninsula Hotel Manado. Volume 12 Nomor 1 Januari 2024, hal 791-801 ; ISSN 2303-1174. Universitas Sam Ratulangi Manado.

Bawamenewi, Natalia. dkk (2023). Analisis implementasi perhitungan dan pelaporan PPH Pasal 21 undang – undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP) atas gaji pegawai negeri sipil pada kantor kecamatan bekasi barat tahun 2022. Volume 3 Nomor 5 2023 hal. 1211-1218 ; E-ISSN 2807-4238 dan P-ISSN 2807-4246. Universitas Pertiwi.

Arianty, fitria (2022). *Analisis perubahan tarif progresif pajak penghasilan orang pribadi dalam undang – undang harmonisasi peraturan perpajakan ditinjau dari azas keadilan*. Volume 5 Nomor 1 Juli – Desember 22 ; P-ISSN 2622-1772 dan E-2621-5993. Universitas Indonesia.

